



**PENETAPAN**

Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Desa Lebakwangi, Arjasari, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH.**, advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Arjasari Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 130/Adv/I/2022 tanggal 12/01/2022, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Kel. Sukawarna, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 04 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama

1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0773/120/V/2013;

2. Bahwa setelah menikah (Mei 2013) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di wilayah Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, akan tetapi dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak (keturunan);

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak akhir 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang sifatnya terus menerus, hal mana penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan tersebut dikarenakan:

4. Masalah ekonomi (Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat);

5. Tergugat sering berbohong, dan diduga telah memiliki wanita idaman lain (wil);

6. Bahwa ternyata pula dampak dari perkecokan tersebut sejak pertengahan 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak saling melayani serta tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talak lah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Norazmi Abdul Latif Bin Abdul Latif**) terhadap Penggugat (**Rizka Natalia Binti Eddy Sukardi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;  
Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 19 Januari 2022 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Ariyana S. Ajsakha, S.Ag., SH., advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 130/Adv/I/2022 tanggal 12/01/2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Arjasari Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 130/Adv/I/2022 tanggal 12/01/2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

4 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Kami **Samsul Zakari S.Sy.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ridwan Firdaus,  
S.H.I.**

**Samsul Zakari S.Sy.,M.H.**

Hakim Anggota II,

5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor



**Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom.,  
S.H.**

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp20.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Kuasa	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp175.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

6 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Sor